

JURNAL
POLITICA

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 6 NO.2, AGUSTUS 2015

Penanggung Jawab:

Kepala P3DI (Dr. Rahaju Setya Wardani)
Kepala Bidang Pengkajian P3DI (Ety Tiyastuti)

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

Dewan Redaksi:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. (Politik Dalam Negeri)
Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)
Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)
Drs. Ahmad Budiman, M. Pd. (Komunikasi Politik)

Pelaksana Redaksi:

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Dewi Sendhikasari, D. S.IP., MPA

Staff Redaksi:

Musbiyatun, Panji Fitrianto

Mitra Bestari:

DR. Lili Romli, M.Si. (Perkembangan Politik Nasional, LIPI)
DR. Ganewati Wuryandari, MA. (Hubungan Internasional, LIPI)
DR. Trubus Rahardransah, S.H., M.H., M.Si. (Kebijakan Publik, Usakti/Universitas Trisakti)
DR. Emrus Sihombing, M.Si (Komunikasi Politik, UPH)

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Setjen DPR RI, Gedung Nusantara I, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Telp : 021-5755987 Fax : 021-5756067
Email : jurnal.politica@yahoo.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	iii-iv
Abstrak.....	v-viii
Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia <i>oleh: Ahmad Budiman</i>	107-122
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam Konteks Otonomi Khusus <i>oleh: Riris Katharina</i>	123-144
Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Menyongsong RPJMN 2015-2019 di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh <i>oleh: Hariyadi</i>	145-166
Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	167-190
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Politica, sebagai jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, merupakan wadah bagi para peneliti dan masyarakat akademisi untuk menyampaikan ide dan atau gagasan yang terkait dengan dinamika politik dalam dan luar negeri. Memasuki volume ke-enam tahun 2015, *Jurnal Politica* secara konsisten tetap menyajikan berbagai tulisan ilmiah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Berbagai persoalan strategis dibahas oleh 4 (empat) penulis dalam *Jurnal Politica*, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2015. Keempat persoalan strategis tersebut menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan persoalan digitalisasi penyiaran, kebijakan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat (UP4B), kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan menyosong RPJMN 2015-2019 di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, dan kebijakan poros maritime dunia Joko Widodo dan implikasi internasionalnya.

Tulisan pertama berjudul Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Budiman. Penulis menilai digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebaran dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat.

Penulis kedua, Riris Katharina, menyajikan tulisan dengan judul Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam Konteks Otonomi Khusus. Tulisan yang merupakan hasil penelitian dilatarbelakangi adanya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi UP4B, namun kebijakan pembentukan UP4B telah dirasakan manfaatnya khususnya oleh orang asli Papua pada dua tahun terakhir keberadaannya. Tulisan ini merekomendasikan agar UP4B dapat terus dilanjutkan keberadaannya namun lebih menekankan pada aspek pendampingan dan penguatan kelembagaan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tulisan ketiga berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Menyosong RPJMN 2015-2019 di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, yang ditulis oleh Haryadi. Penulis melihat peta persoalan mitigasi iklim kehutanan di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh belum berperan optimal dalam mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menguatkan kemauan politiknya yang memberikan ruang peran bagi daerah dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi iklim sektor. Hal ini mensyaratkan penguatan koordinasi dan sinergitas pusat dan daerah untuk menjamin kejelasan dan konsistensi tujuan mitigasi. Dalam konteks ini, 'rekonsiliasi' antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor kehutanan karena seringnya potensi sektor kehutanan dijadikan sebagai alat tawar baru daerah. Dengan demikian, RPJMN 2015-2019 harus menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan serangkaian kebijakan mitigasi ini.

Tulisan keempat disajikan oleh Poltak Partogi Nainggolan dengan judul Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. Tulisan yang berasal dari hasil penelitian penulis, memaparkan poros maritim dunia telah dicanangkan oleh Pemerintah Joko Widodo dan tengah diawasi implementasinya oleh DPRRI. Negara dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara memberikan respons mereka masing-masing yang beragam, terutama terkait dengan

kebijakan pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang kritis, dan bahkan asertif, terhadap penegakan hukum di laut Indonesia.

Demikianlah pengantar atas keempat tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Berbagai tulisan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga alternatif pemikiran bagi para pembaca yang menaruh perhatian terhadap isu-isu yang dibahas dalam judul ini. Sebagai sebuah kajian, redaksi juga berharap tulisan-tulisan ini dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama para pengambil kebijakan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si dan Dr. Ganewati Wuryandari, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Dr. Emrus Sihombing, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, dan Dr. Trubus Rahardiansyah, Pakar Administrasi Publik Universitas Trisakti, sebagai mitra bestari, atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Agustus 2015

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ahmad Budiman

Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebaran dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya mengatur tentang penyiaran.

Kata kunci: digitalisasi penyiaran, model migrasi, *analog switch off/ASO*, *digital dividend*, wilayah siar.

Ahmad Budiman

Model of Digitalization of Broadcasting in Indonesia

Broadcasting digitalization can increase efficiency of broadcasting infrastructure management which can result in maximum audio and audio visual broadcasting. Therefore, choice of models of broadcasting digitalization management cannot be separated from principles of efficiency and goals for attaining maximum digital dividend. Broadcasting digitalization moreover provides various opportunities for people to choose its dissemination technology and the ways its substances can be received. The essay says that broadcasting digitalization in Indonesia must be regulated in law regarding broadcasting.

Keywords: broadcasting digitalization, migration model, analog switch off/ASO, digital dividend, broadcasting zone.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Riris Katharina

Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam Konteks Otonomi Khusus

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh keluarnya kebijakan Presiden SBY dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi UP4B, namun kebijakan pembentukan UP4B telah dirasakan manfaatnya khususnya oleh orang asli Papua pada dua tahun terakhir keberadaannya. Tulisan ini merekomendasikan agar UP4B dapat terus dilanjutkan keberadaannya namun lebih menekankan pada aspek pendampingan dan penguatan kelembagaan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Kata kunci: UP4B, Perpres 66/2001, otonomi khusus, Papua, Papua Barat.

Riris Katharina

Policy Implementation of Formation of the Unit for Development Acceleration in the Provinces of Papua and West Papua (UP4B) in the Context of Special Autonomy

This essay is a research report on President SBY's policy on acceleration of development in the provinces of Papua and West Papua as stated in Presidential Regulation No. 66/2011, which regulated the existence and function of the Unit for Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B), and its implementation and further follow-up. The qualitative method reveals in its conclusions that amid complex problems the provinces facing, working contributions of UP4B has been seen in the both provinces, particularly by native Papuan in the last two years of its existence. This essay recommends that UP4B should be further supported, especially in its role in giving assistances and capacity building in helping the provinces in forming clean, transparent, and accountable governances.

Keywords: UP4B, Perpres 66/2001, special autonomy, Papua, West Papua.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hariyadi

Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Menyongsong RPJMN 2015-2019 di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh

Sebagai pemilik hutan tropis yang luas meskipun pada saat yang sama juga masih harus dihadapkan pada upaya mengatasi merosotnya sumber daya kehutanan, upaya-upaya mitigasi sektor kehutanan di Indonesia memiliki arti yang sangat strategis menyongsong pelaksanaan agenda RPJMN 2015-2019. Bagi pemerintah, upaya ini semua menjadi semakin strategis seiring dengan lemahnya implementasi tata kelola sektor kehutanan seperti diindikasikan dengan masih tingginya deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan, konflik kepemilikan lahan dan perubahan alih fungsi lahan dan hutan. Arti pentingnya hal ini tidak hanya terkait dengan lemahnya pengelolaan hutan selama ini tetapi juga bagaimana serangkaian kebijakan kehutanan dalam jangka menengah dapat dikawal secara berkesinambungan. Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan sangat akan terkait dengan peran daerah. Oleh karena itu, menempatkan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dalam RPJMN dalam konteks peran daerah menjadi salah satu prioritas utama. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan mempertimbangkan sejumlah pandangan sejumlah narasumber pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, riset ini menemukan bahwa kedua provinsi tersebut belum berperan optimal dalam menopang kebijakan yang sama secara nasional. Dalam konteks inilah, kemauan politik pemerintah masih sangat dibutuhkan sedemikian rupa dapat membuka peran daerah dalam isu tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan mendesak untuk penguatan koordinasi dan upaya sinergis lainnya antara pusat dan daerah, dan upaya yang sama dalam mengelola dukungan masyarakat secara umum.

Kata kunci: perubahan iklim, sektor kehutanan, RPJMN, peran daerah, implementasi kebijakan, Papua, Aceh.

Hariyadi

Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh

Having huge tropical forest resources and simultaneously still struggling to cope with the dwindling forest resources, Indonesia's forest mitigation efforts are very crucial following the agenda of the 2015-2019 mid-term national development planning (the RPJMN). For the government, these become more crucial because of the weak implementation of forestry sector governance, indicated by significant deforestation and forest degradation, extreme forest fires, high tenurial conflicts and land-use and land cover changes. The relevance of these issues is not only related to the recent weak forestry management but also how a set of mid- and long-term national forestry policies can be sustainably implemented. Furthermore, the implementation agenda of climate change mitigation policies of the forestry sector will closely relate to the regional roles. Therefore, putting climate change mitigation policies of the forestry sector in the RPJMN in the framework of the regional roles becomes high priority. The research, applying descriptive analytical approach and considering views from considerable public and private stakeholders in the provinces of Papua and Aceh, found that the two provinces have not demonstrated an optimum role in sustaining the national policies. Government's political will still needs to be directed to more transparent regional roles on this issue. There is also an urgent need to strengthen coordination and synergy between the central and regional government, and efforts to attract more public supports.

Keywords: climate change, mitigation, forestry, RPJMN 2015-2019, Papua, Aceh.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya

Poros Maritim Dunia telah dicanangkan oleh Pemerintah Joko Widodo dan tengah diawasi implementasinya oleh DPRRI. Negara dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara memberikan respons mereka masing-masing yang beragam, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Tulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian lengkap mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia pemerintah baru Indonesia under Joko Widodo dan respons negara lain terhadapnya, yang mengungkap reaksi, argumen, alasan, dan sikap yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera, Maluku, dan Papua melalui teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, *Focus Group Discussions* (FDG), dan wawancara mendalam terhadap para pengambil keputusan dan ahli pembangunan sektor maritim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang kritis dan bahkan asertif terhadap penegakan hukum di laut Indonesia.

Kata Kunci: poros maritim dunia, Indonesia, kebijakan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, implikasi internasional.

Poltak Partogi Nainggolan

Joko Widodo's World Maritime Axis Policy and Its International Implications

World Maritime Axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPRRI). Countries from inside and outside of the Southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reasons and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Moluccas, and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applies a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive reactions towards law enforcement in the Indonesian water.

Keywords: world maritime axis, Indonesia, President Joko Widodo policy, infrastructure development, law enforcement, international implication.